

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	15
1. Permasalahan	15
2. Ruang Lingkup.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tinjauan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	16
D.Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	17
1. Kerangka Teori	17
E. Sistematik penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2012Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.....	28
B. Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pekoperasian.....	33
1. Kronologi Pembahasan Uundang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.....	34
2. Landasan, Asas, dan Tujuan.....	35
3. Tata Cara Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.	35
4. Perikatan Dalam Koperasi.....	37
5. Tata Cara Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	40

6. Akta Pendirian Koperasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor028/PUUXI/2013aa.....	44
7. Akibat Hukum Dari Perikatan Koperasi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	48
2. Pendekatan Masalah	48
3. Data dan Sumber Data.....	49
4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data	50
5.Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Keberadaan Koperasi Yang Telah Didirikan Atau Yang Telah Menyesuaikan Diri Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.	52
1.Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	52
2. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.....	65
3. Kedudukan Hukum Akta Notaris Pendirian atau Perubahan Koperasi Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi(MK)Nomor 28/PUU-XI/2013.....	78
B. AKIBAT HUKUM DARI PERIKATAN YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH KOPERASI YANG MEMPUNYAI AKTA PENDIRIAN ATAU AKTA PERUBAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012.....	85
1. Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Akta.....	85
2. Akibat Hukum Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Koperasi Yang Mempunyai Akta Pendirian Atau Perubahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.....	90
BAB V PENUTUP.....	95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN	96
LAMPIRAN	